

TGPF Tuding Prabowo Makar

Tiba-tiba saja isu itu muncul. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan Mei menuding ada usaha makar ketika terjadi peristiwa tersebut. Konon tudingan itu, melibatkan Pangkostrad waktu itu, Letjen TNI Prabowo Subianto. Benarkah nama lain ikut terlibat?

Awal meledaknya isu ini, datang dari seorang Marzuki Darusman, Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta, merekomendasikan hasil temuan itu kepada pemerintah. Hasil bidikan itu tertuju kepada pertemuan di Makostrad pada tanggal 14 Mei 1998, dimana Prabowo dan beberapa tokoh bertemu dalam satu diskusi membahas beberapa peristiwa lain.

"Pertemuan dimaksud patut diduga dapat mengungkap peranan pelaku dan pola pengumpulan ditingkat elit politik yang menuju kepada kerusuhan terjadi," begitu Marzuki Darusman menuding. Selanjutnya TGPF menilai peristiwa kerusuhan sebagai akibat terjadinya persilangan ganda antara dua proses pokok.

Yaitu terjadinya pengumpulan dalam tingkat elit politik sehubungan dengan nasib kelangsungan kekuasaan rezim Soeharto yang sedang berkuasa serta proses perkembangan krisis ekonomi yang kian memburuk.

Polemik bergulir

Pertemuan misterius yang diduga sebagai tabir pembuka misteri kerusuhan berkembang menjadi polemik baru yang terus bergulir. Sekarang banyak mendapat tanggapan dari berbagai pihak, tak kurang dari Pangab, Jenderal TNI Wiranto—sehari setelah pertemuan TGPF—mengeluarkan Temuan ini disampaikan kepada pemerintah yang menandatangani keputusan ini," ujar Wiranto menegaskan.

Polemik selanjutnya seperti terusan saja bergulir karena beberapa tokoh yang menghadiri pertemuan misterius memberikan tanggapan negatif terhadap hasil temuan TGPF dan menganggapnya sebagai sesuatu yang mengada-ada. Bahkan adik kandung Prabowo Subianto, Hashim S. Djohadikusumo menanggapi temuan TGPF dengan emosional menyangkut dugaan keterlibatan kakaknya selaku Pangkostrad waktu itu.



Prabowo dan Sjafrudin Sjamsudin

Menurut Hashim, pertemuan itu sebenarnya diprakarsai Adnan Buyung Nasution, Syafrudin Sjamsudin, Dien Sjamsudin, Iqbal Assegaf, Fadli Zon, Ruhut Sitompul, Bambang Widjojanto, Setiawan Djody, WS.Rendra, Fahmi Idris, Afityawarman, Muhi PR, Hashim S. Djohadikusumo dan Prabowo Subianto. Anehnya mereka yang menghadiri pertemuan ini, dibidik ikut terlibat. Tapi beberapa nama inipun angkat bicara. Mereka menolak mau mengadakan makar, pertemuan itu hanya bersifat silaturahmi seksual yang sangat dibesar-besarkan.

Tidak hanya itu beberapa tokoh masyarakat merasa perlu memberikan tanggapan terhadap polemik dalam dimensi baru. Misalnya datangnya dari Ketua partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, menilai permasalahan baru akan terkuak dari fenomena polemik tersebut adalah pertarungan terhadap kredibilitas pemerintah. Ia melihat pemerintah sebagai

salah satu pihak yang berkompeten dalam hal ini seharusnya kembali bertanya dalam menentukan sikap.

"Pemerintah harus menentukan sikap, apakah dia akan berpihak kepada rakyat atau bersikukuh dengan status quo. Jika pemerintah berpihak pada rakyat maka rakyat pun akan mendukung pemerintah. Tak perlu khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," demikian tanggapan yang dikeluarkan orang nomor satu PAN.

Sementara Marzuki Darusman sendiri menolak dituding melewati batas kewenangan dengan melakukan investigasi, analisis dan kesimpulan terhadap fakta yang didapatnya. Menurutnya suatu hal yang muskil jika melakukan pengumpulan fakta tanpa melakukan proses analisa. Tapi dalam mandat yang diberikan enam menteri menyebutkan memberikan kewenangan untuk melakukan analisis sebagaimana pemnyataan yang keras dengan mengatakan tim yang dibentuk berdasarkan keputusan lima menteri itu telah melewati batas

legitimasi.

Mereka dituduh terlalu banyak menganalisa dan terlalu cepat mengambil kesimpulan terhadap peristiwa kerusuhan Mei lalu. "Sekarang ternyata sudah berkembang, dan saya mengingatkan ini bukan investigasi. Tim ini hanya mencari fakta yang berkembang di masyarakat berdasarkan hasil temuan dan testimoni.

Hashim Djohadikusumo mengatakan dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan sebagai salah seorang yang turut menghadiri pertemuan di Makostrad, membeberkan tuduhan itu sangat mengada-ada dan fitnah belaka. "Tudingan itu sangat berlebihan. Saya pribadi yang menghadiri pertemuan itu, hanya pertemuan silaturahmi. Fitnah itukan sama dengan pembunuhan. Kalau itu benar fitnah, berarti mereka sudah membunuh kami," begitu Hashim menuturkan pada wartawan, pekan lalu.

"Fakta pertemuan tersebut telah digeneralisasikan begitu saja oleh anggota TGPF seolah-olah terjadi sesuatu yang lebih besar dari sekadar sebuah pertemuan. Saya kecewa karena substansi yang sesungguhnya belum masuk kesimpulan," ujar Da'i Bachtiar, Dankoserse Mabes Polri. Lalu ditambahkan, jumlah korban kekerasan seksual yang telah diumumkan TGPF dimasukan ke dalam kategori unit analisis sebagai suatu analisis dan generalisir antara perkosaan dan kekerasan tercantum dalam butir 4a.

Suatu hal yang pasti adalah bahwa TGPF telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan tindak lanjut terhadap pertemuan misterius ini. Bahwa fakta lain menyebutkan TGPF adalah mencari fakta seputar kerusuhan Mei lalu, adalah tugas pemerintah untuk diturunkan sudah demisioner. "Jika pemerintah mengharapkan klarifikasi terhadap temuan ini, saya siap membantu," kilah Marzuki Darusman. ■ M. Imran, Nazar Hosain

Pertemuan Makostrad Versi Djody dan Rendra

Rekomendasi TGPF nampaknya berbuntut panjang. Dua orang tokoh yang ikut menghadiri pertemuan 14 Mei itu angkat bicara. pengusaha tanker Setiawan Djody dan seniman kondang W.S. Rendra, menilai rekomendasi tersebut sebagai sesuatu yang terlalu didramatisir. Benarkah demikian?

Djody merasa heran dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta mengenai hasil pertemuan di Makostrad, sebab menurutnya, pada saat itu juga hadir Ketua YLBHI Bambang Widjojanto yang kemudian menjadi anggota TGPF, mengapa Bambang tidak memberikan keterangan kepada tim? Inilah yang menimbulkan pertanyaan bagi keduanya, seharusnya Bambang juga mengetahui hasil pertemuan itu paparnya lebih lanjut.

Namun pertanyaan kemudian bergulir perihal kapasitas mereka sebagai budayawan dan seniman dalam pertemuan tersebut, Djody mengatakan bahwa ide awal dari pertemuan tersebut datang dari Adnan Buyung Nasution, beberapa waktu menjelang pertemuan Djody ditelepon oleh Adnan Buyung yang meminta untuk dipertemukan dengan Pangkostrad Letjen TNI Prabowo mengenai perkembangan situasi terakhir ditengah air yang sangat memprihatinkan, serta berkembangnya isu mengenai friksi yang terjadi antara Wiranto dan Prabowo. Kemudian setelah menghubungi Prabowo melalui Fahmi Idris, siang Djody mendapat respon dari Prabowo yang menyepakati untuk bertemu dimarkas Kostrad setelah maghrib.

Diceritakan oleh Djody bahwa dalam Pertemuan itu ia dan Rendra termasuk dalam kelompok yang datang paling awal. Disusul Adnan Buyung Nasution yang datang bersama ketua YLBHI, Bambang Widjojanto, Ruhut Sitompul dan Hotma Sitompul. Selain itu dimarkas Kostrad juga sudah hadir tokoh-tokoh masyarakat diantaranya Ketua GP Ansor, Iqbal Assegaf, Farid Prawiranegara, dan pengusaha yang juga adik Prabowo sendiri Hashim Djohadikusumo, sedangkan dari golongan ABRI sendiri terlihat hadir Kus Kostrad Mayjend Kivlan Zein, Danjen Kopassus dan Pangdam Jaya Mayjen Sjafrudin



W.S. Rendra

Sjamsudin, tetapi Mayjen Sjafrudin Sjamsudin yang datang bersama kelompok Prabowo langsung minta izin kepada Prabowo karena harus kembali ke kantornya.

Substansi Pertemuan itu sendiri membahas mengenai situasi keamanan ibu kota pada saat itu, dan Adnan Buyung Nasution mempertanyakan perihal keterlibatan Prabowo dalam kasus penembakan mahasiswa Trisakti. Sedangkan menanggapi pertanyaan yang cukup keras dari Buyung perihal berbagai hal, dijelaskan oleh Djody, bahwa

Prabowo membantah semua isu tersebut dengan tenang dan positif.

W.S. Rendra yang juga hadir pada saat memberi keterangan pers sempat membacakan puisinya. Dia menyatakan keheranannya, mengapa pertemuan di markas Kostrad bisa menjadi sesuatu yang penting sekali sehingga perlu diselidiki. Menurutnya itu hanya pertemuan biasa sehingga jangan terlalu didramatisir apalagi sampai terjadi pendangkalan. Rendra juga mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan keinginannya yang dikemukakan kepada Setiawan Djody, karena merasa prihatin dengan kondisi dan isu-isu yang berkembang diseperti diri Prabowo, dan juga mengenai isu terakhir yang berkembang mengenai niat presiden Soeharto untuk lengser keprabon.

Mengenai kemungkinan mundurnya Soeharto, Prabowo mengatakan karena sudah letih dan juga Soeharto tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaannya. Menurutnya pada saat itu yang paling banyak banyak mengajukan pertanyaan adalah Adnan Buyung dan Bambang Widjojanto yang kemudian menjadi anggota Tim Gabungan Pencari Fakta, yang menyarankan pemerintah untuk menyelidiki pertemuan di markas Kostrad 14 Mei. "Bukankah Bambang sendiri tahu mengenai isi pertemuan tersebut?" ujar Willy, sapaan akrab W.S. Rendra. ■ M. Imran,